



PPKM MIKRO DIPERPANJANG HINGGA 8 MARET Pemda Diminta Sosialisasi Hingga RT

JAKARTA (KR) - Pemerintah melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali, diperpanjang dengan periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021. Langkah ini ditempuh karena selama penerapan PPKM mikro, jumlah kasus aktif Covid mengalami penurunan signifikan secara nasional, yaitu 17,27 persen dalam sepekan.

"Kami umumkan perpanjangan PPKM, karena PPKM termonitor bisa menekan berbagai kriteria yang ditetapkan dalam menangani Covid-19," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (20/2).

Airlangga menyatakan, selain itu tren kasus aktif di lima provinsi berhasil turun, yakni DKI Jakarta,

Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. "Kemudian, tren bed occupancy ratio (BOR) menurun, seluruh provinsi berhasil menurunkan BOR hingga kurang dari 70 persen," ujarnya.

Hal lain yang juga dicapai selama penerapan PPKM mikro adalah tingkat

kesembuhan di lima provinsi berhasil meningkat, yaitu di DKI Jakarta, Banten, Jabar, DIY, dan Jatim. Sementara, tren kematian di tiga provinsi mengalami penurunan, yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Bali.

Sedangkan, kepatuhan protokol kesehatan di seluruh provinsi berhasil meningkat yaitu di kisaran

87,64 persen hingga 88,73 persen.

"Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro selama lima minggu telah berhasil mulai menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan," tutur Airlangga.

* Bersambung hal 10 kol 1

**Berjualan Keliling
Wajib Taati
Prokes Covid-19**



ILUSTRASI JOS

**Happy Land
Medical Centre**

☑ Poli Umum ☑ Poli Gigi ☑ Poli Anak ☑ Poli Gyn ☑ Poli Kesehatan Jwa
☑ Poli Bedah ☑ Poli Saraf ☑ Poli THT ☑ Poli Jantung ☑ Poli Kulit & Kelamin
☑ Hemodialisa ☑ Rehab Medis ☑ Poli Mata ☑ Poli Paliologi ☑ Poli Penyakit Dalam

Melayani Telemedicine
Hotline: 0812 1882 1170

Data Kasus Covid-19 Sabtu, 20 Februari 2021

1. Nasional:	2. DIY:
- Pasien positif : 1.271.353 (+ 8.954)	- Pasien positif : 26.281 (+201)
- Pasien sembuh : 1.078.840 (+9.835)	- Pasien sembuh : 19.846 (+129)
- Pasien meninggal : 34.316 (+164)	- Meninggal konfirmasi : 627 (+3)

Sumber: Satuan Tugas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/PPemda DIY. (KR-Ria/lra)

Pemda Sambungan hal 1

Namun demikian, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mensosialisasikan PPKM mikro dengan baik hingga ke tingkat RT/RW, sehingga penerapannya diharapkan bisa menekan laju penyebaran Covid-19.

"Kita harapkan kepemimpinan unsur pemerintah yang terdepan, yaitu para kepala desa dan juga para lurah, agar bisa menyampaikan pesan, menyampaikan tentang program PPKM skala mikro kepada Ketua RT dan juga RW," kata Doni.

Dia menyampaikan hal itu untuk menanggapi informasi yang menyebutkan masih banyak Ketua RT di Jawa Tengah yang tidak mendapat sosialisasi tentang PPKM mikro sehingga mereka tidak paham apa yang harus mereka lakukan.

Ia mengatakan bahwa dalam sosialisasi PPKM mikro, pemerintah telah berusaha keras untuk bisa memberikan informasi secara masif tentang perlunya PPKM skala mikro kepada masyarakat.

Penerapan kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan strategi yang sangat baik untuk bisa menekan laju peningkatan kasus Covid-19, terutama di skala mikro, mengingat penularan yang cukup tinggi dari kluster keluarga, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan.

Sesuai masukan dari sejumlah pakar epidemiologi untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kasus Covid-19, maka pemerintah mengalokasikan anggaran bagi desa dan kelurahan untuk dapat mensosialisasikan PPKM skala mikro kepada warganya masing-masing dan juga melakukan upaya pencegahan serta penanganan Covid-19 lainnya.

Jika masyarakat menemukan masih ada ketua RT/RW yang belum mendapat sosialisasi tentang pelaksanaan PPKM mikro tersebut, maka ia berharap masyarakat bisa menginformasikannya kepada Satgas Covid-19 sehingga bisa ditindaklanjuti.

"Jadi tolong bisa diinfokan ke kami RT-nya, di desa apa atau di mana, kelurahan apa, sehingga nanti kami bisa mengingatkan Satgas mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan juga Satgas di tingkat kecamatan untuk bisa turun lebih optimal lagi ke tengah-tengah masyarakat, terutama ketua RT dan RW," kata Doni. (Ati/Lmg)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005